

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI
LAMPIRAN I.1 PENGAMBIL KEBIJAKAN

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB	...Kab/kota	yang ada pada lampiran LPPD	FC Perda IMB atau Perda ttg Pajak dan Retribusi	OPD yang menangani: Dinas Prasjal/ BKPMPT/ Biro Hukum
		Jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	...Kab/kota		Jumlah Kab/Kota	Biro Pem
2	Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan	Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan	...Kab/kota		FC Perda Kependudukan atau Perda Pajak dan Retribusi	OPD yang menangani: Biro Pem/ Biro Hukum
		Jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD	...Kab/kota		Jumlah Kab/Kota	Biro Pem
3	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2017	orang		FC jumlah personil Satpol PP tahun 2017,	OPD yang menangani: BKD/ Satpol PP
		Penduduk pada akhir tahun 2017	Jiwa		FC jumlah penduduk tahun 2017	DPPKBKPS
4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	Tanggal Penyampaian LPPD 2017 (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian		FC Bukti Penyerahan LPPD 2017 kepada Kemendagri (Dirjen Otda)	Biro Pem
5	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2017 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian		FC Bukti Penyerahan Laporan Keuangan Provinsi TA 2017 kepada BPK RI	Bakeuda
6	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Total Urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota	... Urusan		FC rangkuman program dalam APBD, Laporan realisasi per urusan	Biro Organisasi
		Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD	... Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota	Biro Pem
7	Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	1. No dan tgl MOU yang berlaku s.d. tahun 2017	Jumlah			Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau
		2. No dan tgl MOU yang berlaku s.d. tahun 2017	No&tgl MOU		FC lembar halaman muka dan lembar pengesahan	
		3. No dan tgl MOU yang berlaku s.d. tahun 2017MoU			
		4. No dan tgl MOU yang berlaku s.d. tahun 2017MoU			
		5. No dan tgl MOU yang berlaku s.d. tahun 2017MoU			
8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional	Prioritas Pembangunan			FC Daftar Prioritas Daerah yang tercantum dalam RKPD 2017 yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional
		Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prioritas	Prioritas Pembangunan			
9	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Total urusan yang dilaksanakan kab/kota	%		Agregasi (tidak perlu data pendukung)	
		Jumlah kabupaten/kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan	19 Kab/kota			
10	Waktu penetapan perda APBD 2017	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2017	tgl penetapan		FC halaman muka dan lembar pengesahan APBD	Bakeuda
11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Ada/tidak		FC halaman muka dan lembar pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Bakeuda
12	belanja untuk pelayanan dasar	Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017	Rp		FC Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK.	Bakeuda
		1. Urusan Pendidikan	Rp			
		2. Urusan Kesehatan	Rp			
		3. Urusan PU dan Tata Ruang	Rp			
		4. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp			
		5. Urusan Trantibum dan Linmas	Rp			
		6. Urusan Sosial	Rp			
Total Belanja APBD	Rp		FC Laporan Keuangan yang telah			

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
13	belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan Tahun 2017	Rp		FC Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK,	Bakeuda
		1. Urusan Pendidikan	Rp			
		2. Urusan Kesehatan	Rp			
14	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ada/tidak PERDA tentang Standar Pelayanan Publik	Ada/tidak		FC Perda urusan atau Perda Pelayanan Publik	Biro Hukum
		Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2017	orang		
		Penduduk pada akhir tahun 2017	Jiwa		Daftar Jumlah Penduduk per 31 Desember 2017	DPPKBKPS
16	Keberadaan sistem informasi kepegawaian	1. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1	Sistem	SIMPEG	Print Out dari print screen menu aplikasi simpeg	BKD
		2. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1	Sistem			
17	Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Jumlah SKPD	Unit		FC Perda tentang SOTK sesuai dengan PP 18 Tahun 2016, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	Biro Organisasi
		1. Biro (setda)	Unit			
		2. Dinas	Unit			
		3. Badan	Unit			
		4. Kantor	Unit			
		5. Rumah Sakit	Unit			
		6. Lembaga Teknis lainnya	Unit			
		7. Kabupaten/kota	Unit			
18	Jumlah perda yang ditetapkan tahun 2017	PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017	Perda		1. FC Perda ttg Penetapan APBD, 2. Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dll	Biro Hukum/ Setwan
19	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017	Raperda		FC Surat Keputusan DPRD ttg Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017	Biro Hukum, Setwan
		RAPERDA yang diusulkan tahun 2017	Raperda			
20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2017	Keputusan		FC Surat Keputusan DPRD ttg LKPJ tahun 2016 FC Produk Hukum Pemda ttg tindaklanjut Keputusan DPRD	Setwan
		Keputusan DPRD dalam tahun 2017	Keputusan			
21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Keputusan Gubernur tahun 2016 yang ditindaklanjuti	Keputusan		Daftar Keputusan Gubernur Tahun 2017 yang ditandatangani pejabat berwenang	Biro Hukum
		Keputusan Gubernur tahun 2017	Keputusan			
22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Peraturan Gubernur tahun 2017 yang ditindaklanjuti	PerGub		Daftar Peraturan Gubernur Tahun 2017 yang ditandatangani pejabat berwenang	Biro Hukum
		Peraturan Gubernur tahun 2017	PerGub			
23	Jumlah PERDA yang dibatalkan	PERDA yang dibatalkan	Perda		Daftar perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh Pemerintah yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	Biro Hukum
		PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah	Perda			
24	Keberadaan PERDA/PerGub tentang konsultasi publik	ada/tidak ada PERDA/PerGub tentang konsultasi publik	Ada/tidak		FC Perda atau Pergub Berita Acara Konsultasi Publik/Notulesi Konsultasi Publik	Biro Hukum Setwan
25	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Provinsi, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	1. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #1	Media informasi		Print Out Halaman depan Web	Diskominfo/ Biro Humas
		2. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #2	Media informasi			
		3. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #3	Media informasi			
		4. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #4	Media informasi			
26	dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Bakeuda
		Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2017	Rp			
27	Belanja Publik terhadap DAU	Belanja Langsung APBD tahun 2017 (Realisasi)	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Bakeuda
		DAU Tahun 2017	Rp			
28	Belanja Publik terhadap total APBD	Total Belanja langsung tahun 2017 (realisasi)	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Bakeuda
		Total Belanja APBD tahun 2017 (realisasi)	Rp			
29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dim APBD	PAD APBD (Realisasi) Tahun 2017	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Bakeuda
		Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017	Rp			

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG YG DIMINTA	SUMBER DATA
30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016	WTP, WDP, TMP, TW		FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Provinsi tahun 2016	Bakeuda/ Inspektorat
		Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017	WTP, WDP, TMP, TW		FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Provinsi tahun 2017	Bakeuda/ Inspektorat
31	SILPA thdp total pendapatan	SILPA Tahun 2017	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Bakeuda
		Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017	Rp			
32	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD Tahun 2017	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Bakeuda
		Total Pendapatan dalam APBD 2017	Rp			
33	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi Belanja Tahun 2017	Rp		Laporan Realisasi Anggaran setelah diaudit oleh BPK RI	Bakeuda
		Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2017	Rp			
34	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2017	Temuan		1. FC Rekomendasi LHP BPK, 2. FC Rekonsiliasi antara Inspektorat dengan BPK, 3. Perhitungan prosentase/rasio tuntas/tidak tuntas	Inspektorat
		Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2016	Temuan			
35	Rasio Realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD	Realisasi PAD Tahun 2017	Rp		Laporan anggaran keuangan 2017 setelah Audit BPK RI	Bakeuda
		Potensi PAD Pada tahun 2017	Rp			
36	Peningkatan PAD	Total PAD pada tahun 2017	Rp		Laporan realisasi anggaran 2017 setelah Audit BPK RI	Bakeuda
		Total PAD pada tahun 2016	Rp			
37	Penghargaan dari LKPP yang diberikan kepada LPSE Provinsi Sumatera Barat Kategori Peran LPSE Provinsi Dalam Pembinaan LPSE Kabupaten/Kota	Penghargaan LKPP	1 Penghargaan		Foto copy Penghargaan	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD
38	Keberadaan E-procurement	ada/tidak ada Perda/Keputusan KDH tentang E-Procurement	Ada/tidak		Print out proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari Pengumuman sampai dengan Penetapan Pemenang. FC halaman depan (cover), halaman pertama dan halaman ditandatangani perda tentang E-Procurement	Bappeda
39	Jumlah persetujuan investasi	Persetujuan Ijin Investasi pada Tahun 2017	Izin		Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2017 dan total nilai investasi	DPMPPT

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI
LAMPIRAN I.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM (DATA ISIAN PER SKPD)

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah	program	yang ada pada lampiran LPPD	FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukkan program	Masing-masing SKPD
		Jumlah program nasional (RKP)	program		Given	
2	Standard Operating Procedure (SOP)	33 SOP	33 buah			Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD
		Pengajuan Nota Dinas Pencairan Dana			Foto Copy SOP	
		Pengajuan Nota Dinas Perjalanan Dinas			Foto Copy SOP	
		Pengajuan Nota Dinas Pengamanan Aset			Foto Copy SOP	
		Pengajuan Nota Dinas Pemeliharaan Aset			Foto Copy SOP	
		Pengajuan Izin Peminjaman Kendaraan Dinas			Foto Copy SOP	
		Pendistribusian Pegawai Lingkup Biro			Foto Copy SOP	
		Pengurusan Surat Masuk			Foto Copy SOP	
		Pengurusan Surat Keluar			Foto Copy SOP	
		Surat Edaran			Foto Copy SOP	
		Kenaikan Pangkat			Foto Copy SOP	
		Pengisian DP3			Foto Copy SOP	
		Pengajuan Permintaan GU			Foto Copy SOP	
		Pencatatan Transaksi Pada BKU			Foto Copy SOP	
		Pengadaan Barang Aset dan Habis Pakai			Foto Copy SOP	
		Pengembalian ATK			Foto Copy SOP	
		Pengamanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Dinas			Foto Copy SOP	
		Pengamanan Sertifikat Tanah			Foto Copy SOP	
		Penerbitan Surat Izin Penghunan (SIP) Rumah Dinas			Foto Copy SOP	
		Sewa Barang Milik Daerah			Foto Copy SOP	
		Pembahasan Dokumen Rencana Barang Milik Daerah Murni dan Perubahan (Pengadaan dan Pemeliharaan)			Foto Copy SOP	
		Edaran Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Murni dan Perubahan (Pengadaan dan Pemeliharaan)			Foto Copy SOP	
		Pembahasan Dokumen RUP			Foto Copy SOP	
		Survey Harga Barang dan Jasa			Foto Copy SOP	
		Pengadaan Barang dan Jasa			Foto Copy SOP	
		Penatausahaan Aset			Foto Copy SOP	
		Penilaian BMD			Foto Copy SOP	
		Penyusunan Buku Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan BMD			Foto Copy SOP	
		Hibah BMD			Foto Copy SOP	
		Penjualan BMD			Foto Copy SOP	
		Penghapusan BMD			Foto Copy SOP	
		Pinjam Pakai BMD			Foto Copy SOP	
		Penetapan Status Penggunaan BMD dari Hibah			Foto Copy SOP	
		Penetapan Status Pengguna BMD			Foto Copy SOP	
3	Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Buah	Perda 10 Tahun 2018		Foto Copy Perda	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD
4	13 Jabatan Eselonering	13 Jabatan	Jabatan		Struktur Organisasi	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD
5	1 Jabatan Fungsional (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa)	1 org	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Foto Copy SK	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD
6	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	52 orang	52 orang		Foto Copy Daftar PNS	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD
		Jumlah PNS Provinsi	orang		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS Provinsi dari BKD	BKD
7	7 (tujuh) org Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim	7 (tujuh) org Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim	Ir. Syafrizal			
			Budiyarma, S.Sos, M.Si			
			David Yudia Putra, S.Sos, M.Si			
			Bani Armin, S.Sos			
			Cerry, M, ST, MM			
			Fadli Ilham, SE, Mec. Dev			
			Yanes Boy			
			Ir. Zainar			
		13 (tiga belas) org pejabat yang ada di Biro AP2BMD	Ir. Syafrizal			

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA		
1	2	3	4	5	6	7		
			Budiyarma, S.Sos, M.Si			Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD		
			David Yudia Putra, S.Sos, M.Si					
			Bani Armin, S.Sos					
			Cerry. M, ST, MM					
			Fadli Ilham, SE, Mec. Dev					
			Yanes Boy					
			Ir. Zainar					
			April Diwan, S.Sos					
			Noveardi Saipunir, SE					
			Rini Amelia Sari, ST, MT					
			Melky Eka Saputra, SE, M.Si					
			Kumila Sofiany, SE					
8	13 (tiga belas org) pejabat yang memenuhi kepangkatan	13 (tiga belas org) pejabat yang memenuhi kepangkatan	Ir. Syafrizal			Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD		
			Budiyarma, S.Sos, M.Si					
			David Yudia Putra, S.Sos, M.Si					
			Bani Armin, S.Sos					
			Cerry. M, ST, MM					
			Fadli Ilham, SE, Mec. Dev					
			Yanes Boy					
			Ir. Zainar					
			April Diwan, S.Sos					
			Noveardi Saipunir, SE					
			Rini Amelia Sari, ST, MT					
			Melky Eka Saputra, SE, M.Si					
			Kumila Sofiany, SE					
	13 (tiga belas org) pejabat yang ada dan yang memenuhi kepangkatan	Ir. Syafrizal						
			Budiyarma, S.Sos, M.Si			Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD		
			David Yudia Putra, S.Sos, M.Si					
			Bani Armin, S.Sos					
			Cerry. M, ST, MM					
			Fadli Ilham, SE, Mec. Dev					
			Yanes Boy					
			Ir. Zainar					
			April Diwan, S.Sos					
			Noveardi Saipunir, SE					
			Rini Amelia Sari, ST, MT					
			Melky Eka Saputra, SE, M.Si					
			Kumila Sofiany, SE					
9	Renstra Biro AP2BMD	Renstra	ada		Foto Copy Renstra	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD		
	Renja Biro AP2BMD	Renja	ada		Foto Copy Renja			
10	7 (tujuh) Program Biro AP2BMD	7 (tujuh) Program RKPd yang diakomodir dalam Renja OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Foto Copy Program dan Kegiatan di Renja	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur					
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan					
			Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah					

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemda			
			Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik			
		7 (tujuh) Program Renja yang ada di RPJMD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Foto Copy Program dan Kegiatan di Renja	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			
			Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah			
			Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemda			
			Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik			
11	7 (tujuh) Program Renja yang diakomodir di RKA OPD Biro AP2BMD	7 (tujuh) Program Renja yang diakomodir dalam RKA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Foto Copy Rekap RKA	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			
			Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah			
			Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemda			
			Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik			
		7 (tujuh) Program dalam RKA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Foto Copy Rekap	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			
			Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah			
			Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemda			
			Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik			
12	7 (tujuh) Program RKA yang diakomodir di DPA OPD Biro AP2BMD	7 (tujuh) Program OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Foto Copy Rekap	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			
			Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah			

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	
			Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemda			Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD	
			Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik				
		7 (tujuh) Program DPA OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan				
			Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah				
			Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemda				
			Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik				
13	Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD	Total anggaran SKPD	Rp. 7.354.809.777,-		FC Laporan Keuangan SKPD	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD	
		Total anggaran belanja APBD	Rp. 7.354.809.777,-				
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Realisasi Belanja Modal SKPD	Rp. 1.086.637.700,-				Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD
		Realisasi Belanja SKPD	Rp. 6.445.080.550,-				
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp. 125.317.881,-				Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD
		Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp. 5.358.442.850,-				
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp. 125.317.881,-			Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD	
		Realisasi Belanja SKPD	Rp. 125.317.881,-				
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	3 Komponen	3 Komponen			Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD	
	- Neraca	- Neraca	ada		FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca		
	- LRA	- LRA	ada		FC halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA		
	- Calk	- Calk	ada		FC halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CALK		
18	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	Adanya inventarisasi barang / aset SKPD	ada		Laporan hasil Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset (Sensus BMD 2013) Rekap Hasil Sensus BMD Tahun 2014	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD	
19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Aset Dalam Penelusuran	Rp. 4.212.430.008,95		Daftar Rekapitulasi Aset per 31 Des 2018 (Minus Dinas Pendidikan)	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD	
		Aset dipakai pihak lain	Rp. 3.158.028.093,00				
		Aset tidak bermamfaat	Rp. 63.365.574.673,35				
		Total Aset Tetap	Rp. 10.706.449.517.935,40		Daftar Rekapitulasi Aset per 31 Des 2018 (Minus Dinas Pendidikan)		
		Total Aset lainnya	Rp. 99.564.614.279,30			Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD	
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah			Masing-Masing SKPD	
	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak		Foto		
	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	ada/tidak		Foto		
	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak		FC Leaflet		

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak		Daftar Inventaris	
	5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak		Foto	
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak		FC surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait, dan FC	Masing-Masing SKPD/tingkat Pemda